

Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Utara

Winda Lestari Gurning

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara

Abstracts

The purpose of this study was to analyze the influence of the Village Program Fund on poverty alleviation in North Sumatra. The study population was villages in North Sumatra province that received the Village Fund Program, namely the districts of South Nias, Simalungun, Deli Serdang, Padang Lawas and Mandailing Natal. The analysis tool uses twin regression with panel data for hypothesis testing with the F test, t test, and the coefficient of determination (R^2) at the error rate $\alpha = 5\%$. From the simple regression program analysis above shows the calculated F value of 1.660 with a significance value of 0.288. If the significance value of F arithmetic < 0.05 then the alternative hypothesis is accepted, so that the Village Fund Budget variable influences poverty. The regression results show that the R-Square value is 0.356 or 35.5%. This means that the Village Fund Budget reduces poverty by 25.5% while the remaining 64.5% is contributed by other variables not examined in this study.

Keywords: Fund Village, Rural Poverty.

Abstrak

Pengaruh Dana Program Desa terhadap Pengentasan Kemiskinan di Sumatera Utara. Penduduk studi adalah desa-desa di Provinsi Sumatera Utara yang menerima Program Dana Desa, yaitu kabupaten Nias Selatan, Simalungun, Deli Serdang, Padang Lawas dan Mandailing Natal. Alat analisis menggunakan regresi kembar dengan data panel untuk pengujian hipotesis dengan tes F, uji t, dan koefisien penentuan (R^2) pada tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$. Dari analisis program regresi sederhana di atas menunjukkan nilai F yang dihitung sebesar 1.660 dengan nilai signifikansi 0,288. Jika nilai signifikansi Aritmatika F $< 0,05$ maka hipotesis alternatif diterima, sehingga variabel Anggaran Dana Desa mempengaruhi kemiskinan. Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai R-Square adalah 0,356 atau 35,5%. Ini berarti bahwa Anggaran Dana Desa mengurangi kemiskinan sebesar 25,5% sementara 64,5% sisanya disumbang oleh variabel lain yang tidak diperiksa dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Dana Desa, Kemiskinan Pedesaan.

Pendahuluan

Tujuan pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial dan mengurangi atau mengapuskan kemiskinan, ketimpangan dan penganguran (Todaro, 2000).

Sejalan dengan hal itu, maka untuk melakukan pembangunan ekonomi daerah dikehendaki adanya kerja sama antara pemerintahan baik berupa program-program yang dianggap dapat meningkatkan pembangunan perekonomian.

Kabinet Indonesia Maju memutuskan untuk Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daera-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, upaya dalam menciptakan Lapangan Kerja mengatasi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan. Pembangunan desa dinilai sangat berpotensi dalam memberi kontribusi pembangunan baik dari aspek ekonomis maupun politis. Dari segi ekonomis keberadaan desa sangat memegang peran penting , terutama sebagai salah satu indikator kuat atau lemahnya perekonomian suatu daerah maupun negara. Sementara dari aspek politik desa bisa menjadi indikator suara sekaligus aspirasi dasar rakyat yang tidak boleh dihiraukan. Dengan pembangunan desa diharapkan masyarakat desa tidak lagi melakukan urbanisasi ke kota dengan beranggapan bahwa perekonomian dikota lebih baik dari pada di desa, akan tetapi dengan pembangunan di desa diharapkan masyarakat produktif desa melihat peluang untuk berkontribusi di daerah asalnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan desa dan desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran

dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Sumber-sumber pendapatan Desa yaitu; (1) pendapatan asli desa (2) Dana desa yang bersumber dari APBN (3) bagian dari hasil PDRD Kab/kota (4) alokasi Dana desa dari Kab/Kota (5) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota (6) hibah dan sumbangan pihak ketiga dan (7) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana desa adalah Dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya Dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Sesuai salah satu dari Program dana Desa adalah mengentaskan kemiskinan, diperlukan kebijakan yang sangat tepat dan berkelanjutan dalam menggapainya.

Kajian kemiskinan telah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu. Pada tahun 1899, Seebohm Rowntree melakukan studi tentang kemiskinan di Bew York Inggris (Haughton dan Sahidur, 2009)

Kemiskinan adalah sebuah fenomena, suatu kenyataan yang belum dan takkan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan dan perbedaan sumberdaya. Kajian kemiskinan ini telah menjadi perbinjangan diseluruh negara di dunia terlebih negara sedang berkembang Terutama Indonesia. Mengukur Tingkat kemiskinan sejauh ini banyak cara yang digunakan sehingga menghasilkan Hasil akhir yang berbeda pula. Pada umumnya Kemiskinan ditandai dengan Kelaparan, kekurangan gizi, ketidak adaan tempat tinggal, tidak dapat sekolah , tidak punya akses air bersih dan listrik (Indra Maipita, 2014). Menurut Bank Dunia Kemiskinan adalah berkenaan dengan ketidaadaan tempat tinggal,sakit, dan tidak mampu untuk berobat kedokter,tidak mampu untuk sekolah dan tidak tahu baca tulis, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki akses akan air bersih.

Masalah kemiskinan ekonomi sudah sejak lama ada, bukan hanya masalah kemiskinan secara materi akan tetapi kemiskinan dalam kurangnya menikmati layanan kesehatan, pendidikan, pendidikan tinggi, gizi dan layanan lainnya untuk memenuhi kehidupan jasmani dan rohani. Dari pemaparan BPS Sumatera Utara

menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi berada di daerah pedesaan dibanding di daerah kota.....

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara (000) (Jiwa)

Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
n		n			
2014	2015	2016	2017	2018	2019
1360.	1463.6	1455.	1453.8	1324.9	1282.0
6	7	9	7	7	4

Sumber: Data elektronik BPS Sumatera Utara, 2020 diolah

Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pemberian anggaran dana desa maka perlu kita ketahui sejauh mana anggaran dana desa ini berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di Sumatera Utara karena begitu nyata bahwa anggaran dana desa yang tersebar banyak diberikan untuk daerah – daerah yang dianggap layak menerima Sebagai upaya untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan, beberapa program dilaksanakan. Anggaran Dana Desa yang disebarkan juga diselaraskan kepada daerah yang akan memberikan dampak positif sehubungan diberikan anggaran program ADD. Dengan didasarkan pada kondisi Provinsi Sumatera Utara serta permasalahan kemiskinan di wilayah tersebut serta beberapa program pengentasan kemiskinan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut: Sejauh Apa Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Sumatera Utara.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang didasarkan pada analisis berbagai dokumen dan data serta informasi, atau dengan kata lain, penelitian ini disusun dengan diawali dari pencarian literatur baik melalui buku, internet, disertai. Berdasarkan metode yang digunakan, penelitian ini adalah penelitian korelasional dan berdasarkan tipe data yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series* tahun 2015- 2019 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Sumatera Utara, yaitu Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara dan Anggaran Dana Desa.

Tempat Penelitian ini dilakukan di daerah Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 Kota. Jenis penelitian yang digunakan bersifat *explanatory* yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Kuncoro, 2013). Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Dari data yang diperoleh peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, akurat dan actual mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lapangan sebagai fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena. Teknik kuantitatif akan menggunakan analisis frekuensi yang bertujuan menggambarkan mengenai kondisi secara umum. Data yang dipergunakan sebagai bahan analisis berupa data sekunder yang dikumpulkan dari instansi seperti Badan Pusat Statistika. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan kajian yang dilakukan. Adapun pendekatan metodologi dalam melakukan replikasi dilakukan dengan ekstensi yang akhir-akhir ini mendapat perhatian dan sekaligus didorong untuk lebih banyak dilakukan di ilmu sosial (Hubbard dan Armstrong, 1994); Singh, Ang dan Leong, 2003). Pendekatan metodologi replikasi ini merupakan salah satu cara teknik metodologi yang memberikan kontribusi verifikasi atas data riset survey terhadap keberhasilan program kegiatan yang dijalankan. Paradigma replikasi diformulasikan untuk memperjelas terminology dan fungsi-fungsinya. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan data panel yang kemudian dilakukan pengujian hipotesis Untuk memahami permasalahan penelitiannya dalam pembahasannya akan dilihat hubungan variabel-variabel penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Untuk selanjutnya mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada tentang bagaimana pengaruh adanya program Dana Desa terhadap pengurangan kemiskinan sesuai nawacita Pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Utara.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa perkembangan yang terjadi dalam perekonomian Kota Medan secara umum dan lebih khusus lagi mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah, investasi serta pertumbuhan ekonomi.

2. Analisis Statistik Inferensial

Analisis statistik yang digunakan berupa analisis regresi linier sederhana dengan rumus sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

dimana :

Y = Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara

bX = Anggaran Dana Desa

Hasil Dan Pembahasan

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan maksimal menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Hal diharapkan bahwa dengan berkurangnya pengangguran maka dana desa mengurangi tingkat kemiskinan yang akan mendorong pembangunan perekonomian.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Di Sumatera Utara ada 5418 desa yang tersebar di 27 kabupaten yang mendapat dana desa. Dari 27 kabupaten tersebut lima terbesar penerima dana desa adalah Kabupaten Nias selatan, Deliserdang, Simalungun, Pada Lawas dan Mandailing Natal. Dana Desa tersebut dikucurkan sesuai peruntukan jalan, prasarana kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan, hingga ternak dan lainnya. Adapun untuk pemberdayaan masyarakat antara lain berupa pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan, dan teknologi tepat guna. Setiap tahunnya Anggaran Dana desa di Sumatera Utara mengalami kenaikan hanya di Tahun 2018 Anggaran Dana Desa di Sumatera Utara mengalami penurunan. Dasar hukum tentang desa dan alokasi dana desa dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014. Data yang dilansir dari Dirjen Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa program Sumatera Utara pertama kali menerima dana sebesar 1,46 Triliun Rupiah pada tahun 2015 dan dana tersebut meningkat secara klimaks hingga 4,45 triliun Rupiah pada tahun 2019.

Tabel 2. Anggaran dana Desa Yang Diterima Sumatera Utara Tahun 2015-2019

2015	Rp1,460,000,000,000	1.463.670	10.53
2016	Rp3,293,000,000,000	1.455.000	10.35
2017	Rp 4,197,972,490,000	1.453.870	10.22
2018	Rp 3,879,675,435,000	1.324.970	9.22
2019	Rp 4,450,000,000,000	1.282.040	8.83

Sumber: Data elektronik BPS Sumatera Utara, 2020 diolah

("Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara (000)", "Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara (000)")

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dengan bertambahnya anggaran dana desa akan mengurangi angka persentase penduduk miskin. Data tersebut menunjukkan hubungan bahwa ADD mengurangi persentase penduduk miskin. Penduduk miskin di Sumatera Utara pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan pengurangan 2 digit angka di depan. Pembangunan desa dinilai sangat berpotensi dalam memberi kontribusi pembangunan baik dari aspek

ekonomis maupun politis Salah satu program yang digunakan adalah melalui kebijakan Fiskal dalam bentuk Dana Desa. Program ini adalah program pertama dan terbesar dalam transfer dana langsung ke Desa karena diharapkan dengan adanya program ini akan menciptakan Lapangan Kerja mengatasi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan. Jelas dalam point ke 3 tujuan dari Dana Desa adalah mengentaskan kemiskinan. Sesuai data yang dilansir dari badan Pusat Statistika Sumatera Utara bahwa kurun waktu dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami penurunan walau tidak menunjukkan angka penurunan yang fantastis . Penurunan jumlah masyarakat miskin di Sumatera utara pada tahun 2015 sebesar 10,53 % sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 1,7% yakni menjadi 8.83 % penduduk miskin yang ada di Sumatera Utara.

Estimasi Model Regresi

Model regresi linear yang terbentuk dari hasil pengolahan data adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

dimana :

Y = Kemiskinan

X = Anggaran Dana Desa

Intepretasi dari model persamaan regresi linear ini adalah sebagai berikut :

- Nilai konstanta = 1543791,451 berarti jika Anggaran Dana Desa bernilai nol maka Kemiskinan di Sumatera Utara adalah sebesar 1543791
- Nilai koefisien regresi X= 0,356 bahwa Anggaran Dana Desa mempengaruhi k=pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara sebanyak 35,6%

Uji Signifikansi Parsial t

Hasil dari uji signifikansi parsial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 Hasil Pengujian Signifikansi t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	1543791,451	120152,487		12,849	,001
	ADD	-4,279E-8	,000	-,597	-1,288	,288

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara parsial dapat ditunjukkan oleh nilai t hitung seperti pada Tabel 4. Nilai tersebut dibandingkan dengan t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, atau dengan cara lain, nilai Sig hitung dibandingkan dengan nilai signifikansi 5%. Bila nilai Sig < 5% maka variabel bebas signifikan berpengaruh terhadap variabel terikatnya, demikian sebaliknya.. Hasilnya adalah Variabel Anggaran Dana Desa Berpengaruh Signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.

Uji Signifikansi Simultan F

Hasil uji signifikansi secara simultan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	10488159425,401	1	10488159425,401	1,660	,288 ^b
Residual	18953108374,599	3	6317702791,533		
Total	29441267800,000	4			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), ADD

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Nilai F hitung pada Tabel 5 adalah 1,660 dengan nilai signifikansi 0.288. Bila nilai signifikansi F hitung < 0.05 maka hipotesis alternatif diterima, sehingga variabel Anggaran Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dapat ditunjukkan dari hasil pengolahan data di bawah ini

Tabel 6. Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Determinasi	R	R Square	Change Statistics				Durbin-Watson	
			R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	,597 ^a	,356	,356	1,660	1	3	,288	1,421

a. Predictors: (Constant), ADD

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Hasil yang tercantum dalam Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai R-Square adalah sebesar 0,356 atau 35,5 %. Hal ini berarti bahwa Anggaran Dana Desa mengurangi kemiskinan sebesar 25,5 % sedangkan sisanya sebesar 64,5% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan data dari BPS Sumatera Utara bahwa kemiskinan tertinggi berada pada daerah pedesaan, sehubungan dengan itu program Dana Desa dicanangkan dengan salah satu tujuan pengurangan angka kemiskinan yang disorot adalah daerah pedesaan, Berhubungan dengan Hal pada tahun 2019 tersebut ada 27 kabupaten di Sumatera Utara yang menerima Dana desa dengan pembagian Alokasi Dasar per desa, Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi dan Alokasi Formula. Dari 27 kabupaten ini ada lima kabupaten penerima dana desa terbesar di Provinsi Sumatera Utara yaitu Nias Selatan, Deli Serdang, Simalungun, Padang Lawas, dan Mandailing Natal.....

Tabel 7. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010-2019 di Kabupaten yang Menerima ADD

NIAS SELATAN	54.46	58.97	57.75	57.95	52.7	52.51
DELI SERDANG	90.92	95.65	100.09	97.09	88.52	84.94
SIMALUNGUN	86.25	92.89	92.19	91.35	80.3	76.33
PADANG LAWAS	20.34	22.38	22.8	24.42	23.05	23.17

MANDAILING	39.68	47.79	47.67	48.3	42.39	40.64
NATAL						

Sumber: Data elektronik BPS Sumatera Utara, 2020 diolah

("Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara (000)", "Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara (000)")

Menurut Badan Pusat statistika kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Berdasarkan Data yang disajikan oleh badan Pusat Statistika bahwa setiap tahun nya dari 2014 hingga 2019 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, Sebelum adanya dana desa yakni 2014 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan seperti di Mandailing natal naik dari 39680 orang naik menjadi 47790 kenaikan penduduk miskin mencapai 8110 penduduk. Sedangkan setelah adanya dana desa mandailing natal mengalami penurunan hingga 12 orang . dan ditahun 2017 mengalami penurunan penduduk miskin yang sangat signifikan yaitu 5.910 orang. Dan hal ini juga berpengaruh terhadap 4 daerah lain yang mendapat program Dana Desa, dengan adanya dana desa kelima kabupaten ini mengalami penurunan penduduk miskin. Walau di mandailing natal pada tahun 2019 mengalami kenaikan penduduk miskin namun masih lebih banyak penduduk miskin berkurang 5 tahun terakhir setelah adanya Program Dana Desa.

Keparahan kemiskinan adalah memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 8. Garis Kemiskinan Sumatera Utara per Kabupaten/Kota

NIAS SELATAN	17.81	19.05	18.6	18.48	16.65	16.45
DELI SERDANG	4.56	4.74	4.86	4.62	4.13	3.89
SIMALUNGUN	10.2	10.96	10.81	10.65	9.31	8.81
PADANG LAWAS	8.03	8.73	8.69	9.1	8.41	8.28
MANDAILING	9.28	11.13	10.98	11.02	9.58	9.11
NATAL						

Sumber: Data elektronik BPS Sumatera Utara, 2020 diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Tabel 9. Anggaran Dana Desa yang di Dapat per Kabupaten(000)

		2016	2017	2019	
1	Nias	Rp272.337.2	Rp	Rp	459
	Selatan	92	346.818.470	348.422.333	
2	Deli	Rp237.763.6	Rp	Rp	380
	Serdang	44	303.060.286	306.386.948	
3	Simalungun	Rp230.404.7	Rp	Rp	386
		78	201.000.000	294.442.204	
4	Padang	Rp225.561.5	Rp	Rp	387
	Lawas	57	288.000.000	287.244.660	
5	Mandailing	Rp222.908.9	Rp	Rp	377
	Natal	20	284.048.518	285.841.420	

Sumber: Data elektronik BPS Sumatera Utara, 2020 diolah

Setiap tahun nya anggaran dana desa mengalami peningkatan , dan tertinggi ada pada tahun 2019 , dilihat dari tabel tersebut bahwa anggaran desa yang di dapat kabupaten tiap tahun mengalami kenaikan . dan kabupaten tertinggi jatuh kepada Kabupaten Nias Selatan, karena persentase penduduk miskin di Nias selatan adalah yang tertinggi di Sumatera Utara yakni rata rata 17.82 % rata rata 5 tahun terakhir .

Tabel 10. Anggaran Dana Desa yang di Dapat per Kabupatendan Jumlah Penduduk Miskin 2017 dan 2019(000)

Nama Kabupaten	2017		2019		Selisih
	ADD	Kemiskinan	ADD	Kemiskinan	
Nias Selatan	Rp 346.818.470	57.95	Rp 348.422.333	52.51	5.44
Deli Serdang	Rp 303.060.286	56.93	Rp 306.386.948	48.69	8,24
Simalungun	Rp 201.000.000	91.35	Rp 294.442.204	76.33	15.02
Padang Lawas	Rp 288.000.000	27.98	Rp 287.244.660	26.06	1.92
Mandailing Natal	Rp 284.048.518	48.3	Rp 285.841.420	40.64	7.66

Sumber: Data elektronik BPS Sumatera Utara, 2020 diolah

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa kemiskinan di keliam kabupaten penerima anggaran desa tersebut mengalami pengurangan kemiskinan yang cukup signifikan, selisih terbesar terjadi pada tahun 2019 di kabupaten Simalungun dimana pengurangan kemiskinan sebesar 15.020 penduduk mengalami penurunan kemiskinan. Diikuti dengan kabupaten Deli serdang kemiskinan berkurang hingga 8.240 pada tahun 2017 ke 2019, selanjutnya ada kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah angkat kemiskinan menurun ke angka 7.660, hampir dengan data yang sama di Nias selatan bahwa kemiskinan berkurang dari 57.920 ke angka 52.510 akan tetapi hal berbeda di kabupaten padang lawas utara bahwa kemiskinan hanya berkurang sebanyak 1.920 penduduk akan tetapi tetap menunjukkan penurunan kemiskinan.

Kesimpulan

Kemiskinan adalah sebuah fenomena, suatu kenyataan yang belum terhapuskan dan mungkin saja tidak akan terhapuskan dari muka bumi ini, karena konsep indikator penilaian kemiskinan itu berbeda-beda. Walaupun demikian kesuksesan pemerintahan adalah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah dengan terberantasnya kemiskinan. Menurunkan angka telah menjadi tujuan utama dari kebijakan publik di hampir setiap negara. Kabinet Indonesia Maju memutuskan untuk Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, upaya dalam menciptakan Lapangan Kerja mengatasi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan. Pembangunan desa dinilai sangat berpotensi dalam memberi kontribusi pembangunan baik dari aspek ekonomis maupun politis. Salah satu program yang digunakan adalah melalui kebijakan Fiskal dalam bentuk Dana Desa. Program Dana Desa adalah Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota yang di transfer langsung dari APBN. Sumatera utara merupakan salah satu dari 27 Provinsi yang menerima Dana Desa, ada 5 Kabupaten besar di Sumatera Utara yang menerima Dana Desa seperti Nias Selatan, Simalungun, Mandailing Natal, Deli Serdang dan Padang Lawas. Program dana Desa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai nawacita dari Program ini yakni Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia melalui menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Sumatera Utara, Dari analisis program Eviews diatas menunjukkan bahwa nilai prob. Lebih besar @0,005 yakni 0,01941 data diatas menunjukkan bahwa anggaran desa tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan walau jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 1,3 % selama 5 tahun.

Daftar Pustaka

Abidin, Muhammad Zainul. 2015. *Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. Vol. 6 No. 1, hlm 61-76.

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ariefianto, Doddy. 2012. *Ekonometrika*. Jakarta : Erlangga.
- Bactiar, Miraza. 2010. *Regional Pembangunan Perencanaan*. Medan : Usu Press
- Badan Pusat Statistik. 2015. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2015
_____. 2016. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2016
_____. 2017. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2017
_____. 2018. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2018
_____. 2019. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2019
- Case, Karl & Fair, Ray. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Gujarati, dkk.2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid II*. Jakarta: Erlangga.
- Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Sajogyo. 1997. *Kemiskinan dan kebutuhan Minum Pangan*. Bogor: Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan.
- Sari, Risyia Novita, dkk. 2012. *Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintah Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 3 No. 11, hlm 1880-1885.
- Todaro, Michael & Smith Stephen. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.